



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Budimukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala

Analysis of Village Fund Management in the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Budimukti Village, Dampelas District, Donggala Regency

Ni Made Eva Dwi Yanti^{1*}, Andi Mattulada Amir², Nurhadi³

^{1,2,3}Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Korespondensi: madeevadwiyanti@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Pengelolaan, Bantuan

Langsung Tunai, Dana Desa

Keywords:

Management, Direct Cash Assistance, Village Funds

DOI: [10.56338/jks.v8i7.8194](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8194)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Budimukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala serta kendala pengelolaan keuangan Dana Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Budimukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan APBDesa Desa di Desa Budimukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dimulai dari rapat per dusun, musyawarah desa dan musrembang desa. Dan juga penyusunan RPJMDes dan RKPDes, meskipun perencanaan APBDesa Desa Budimukti masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Merujuk dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan harus dengan cara transparan, akuntabel, inklusif, terstruktur, disiplin, keterbukaan serta akuntabilitas keuangan terutama keuangan desa khususnya terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the management of Village Funds in the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Budimukti Village, Dampelas District, Donggala Regency and the obstacles in managing Village Fund finances in the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Budimukti Village, Dampelas District, Donggala Regency. The type of research used is qualitative research. The results of the study concluded that the planning of the Village APBDesa in Budimukti Village in Dampelas District, Donggala Regency began from hamlet meetings, village deliberations and village musrembang. And also the preparation of the RPJMDes and RKPDes, although the planning of the Budimukti Village APBDesa still has delays in obtaining mutual agreement. Referring to the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Financial Management must be done in a transparent, accountable, inclusive, structured, disciplined, open and accountable manner, especially village finances, especially related to the distribution of Direct Cash Assistance (BLT).

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar didesa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik. Pemerintah berusaha mengatur,

mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah suatu bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara memberikan uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. Adapun penyelenggara bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun tujuan dari program pemerintah ini adalah dapat meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diprioritaskan dengan tujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Namun pada kenyataannya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal. Dari program pemerintah yang digulirkan dengan nama bantuan tunai langsung (BLT) tersebut, ada sebagian penerima program tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pendataan yang tidak benar dalam penetapan rumah tangga sasaran. Serta banyaknya keluhan yang ditemukan dari masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai, yang semestinya mendapatkan ternyata tidak mendapatkan. Adapula kesalahan kedatangan masyarakat yang menerima bansos lain tapi juga menerima BLT.

Berdasarkan observasi di Desa Budimukti Kecamatan Dampelas keluhan dari beberapa warga desa tersebut dikarenakan masih ada yang belum memperoleh BLT padahal mereka telah didata atau selama ini mereka termasuk tergolong keluarga tidak mampu atau rumah tangga miskin. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama proses observasi di beberapa masyarakat Desa Budimukti ini terdapat beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat terkait pendistribusian BLT antara lain sebagaimana dapat diuraikan antara lain pemerintah desa belum mampu menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan kriteria nasional. Dasar penentuan penerima BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan dari pihak RT/RW setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi ekonomi daripada warganya tersebut. Selain itu, permasalahan yang selanjutnya penerima dari bantuan lain seperti sembako dan PKH masih juga menerima BLT. Dengan adanya hal ini, sehingga ditakutkan akan menimbulkan konflik dan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menjadi berkurang. Dengan kondisi serba kesulitan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak ketidakadilan dan perselisihan.

METODE

Peineilitian ini meiruiapkan peineilitian kuialitatif deingan peindeikatan inteirpreitatif. Paradigma peineilitan inteirpreitif beirpandangan bahwa reialitas sosial seicara sadardan seicara aktif dibangun seindiri oleh individu, seitiap individu meimpuinyai poteinsi meimbeiri makna teintang

apa yang dilakukan. Realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada orang yang melakukannya. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisa data secara kualitatif merupakan analisis yang sesuai dengan temuan data di lapangan dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase dari data yang terkumpul akan diinterpretasikan dari gejala-gejala yang bersifat umum diarahkan ke sifat khusus.

HASIL DAN DISKUSI

Pengeelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Perencanaan penyaluran BLT-DD di Desa Buidimukti dilakukan dengan menyuisin APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap tahunnya. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan program APBDes pemerintah mengundang RT, RW dan masyarakat guna memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Proses pembuatan APBDes dilakukan dengan mengundang terlebih dahulu masukan dari masyarakat desa, RT dan RW.

Sebelum itu RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), kemudian RAPBDes dimusyawarahkan dan disampaikan di lembaga BPD. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Semua usulan dari masyarakat ditampung menjadi satu, kemudian dievaluasi dan diadopsi usulan yang paling penting dan selanjutnya disepakati bersama. Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, lalu tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok pada tahap pelaksanaan ini yaitu penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pelaksanaan kegiatan di lapangan tersebut. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Jadi kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan pengelolaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terdapat dua, yaitu: Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan Pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Perbedaan pengelolaan ini terdapat banyak sekali pendapat menurut para ahli jika disimpulkan maka penyaluran BLT-DD ini adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tahapan perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD dilakukan pada tahap ini Penyusunan RAB, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengajuan SPP, Pembayaran, dan Pengeluaran Bukti Kas Pembantu Kegiatan. Dengan dilakukannya suatu

tahapan pada peinyaluiran BLT-DD ini maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan peinyaluiran BLT-DD maka : mengoptimalkan perencanaan kegiatan pada waktu tertentu, meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari, mencapai target perencanaan dengan cara yang efisien dikarenakan dengan adanya ketersediaan dana yang cukup serta direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana pada tiap otoritas.

Pelaksana yang mengguiruis mengenai pengelolaan peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini mencakup Kepala Seksi (kasi), Sekretaris, Kepala desa, Bendahara. Pelaksana tersebut yang mengguiruis bagian mengenai suatu pengelolaan peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada saat itu, tidak hanya itu mereka juga memiliki suatu tugas yang berbeda setiap orangnya yaitu Kepala Seksi (Kasi) memiliki tugas Menyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya, Mengajukan SPP, Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa, dan Mengejarkan Bukti Kas Pembantu Kegiatan. Sekretaris Desa memiliki tugas Memverifikasi RAB, dan Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP. Kepala Desa memiliki tugas Mengeisahkan RAB, dan Menyetujui SPP. Bendahara memiliki tugas Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa, Mencatat transaksi dan Menyusun Bukti Kas Umum, dan Mendokumentasikan bukti pengeluaran.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kelembagaan Pengelolaan Peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrina (2014) dan Elsa Dwi Wahyu Dewi (2019) bahwa pengelolaan peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keindala Pengelolaan Peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kelembatan penyampaian Pagu indikatif Alokasi Dana Desa dari pihak Kabupaten Donggala. Kelembatan penyampaian hasil evaluasi Baidimukti APB Desa dari pihak Kabupaten Donggala yang menghambat penetapan APB Desa. Alokasi Dana Desa yang mengalami kelembatan pencairan khususnya pencairan tahap kedua yang mengakibatkan tunggakan penghasilan tetap dan tunjangan Penerima Desa hingga berbulan-bulan.

Keindala sumber daya manusia terhambat pada saat pelaporan hasil kegiatan karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan hasil kegiatan. Selain itu juga, perekrutan Aparat Desa itu tidak ada syarat-syarat tertentu dan hanya melihat status sosial aparat, hal ini juga semakin menghambat sumber daya manusia. Edward III dalam Tahir (2014) menjelaskan bahwa sumber daya manusia penting meliputi Staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi serta hal-hal lainnya yang terlibat di dalam

implemeintasinya. Hasil peineilitian ini sejalan dengan peineilitian Suibroto (2009) dimana dari sisi administrasi masih dipeirluikan adanya peimbinaan lebih lanjut. Keindala utamanya kompeiteinsi suimbeir daya manusia, sehingga masih meimeirluikan peindampingan dari aparat Peimeirintah Daeirah seicara beirkeilanjutan.

KESIMPULAN

Peirencanaan APBD Deisa di Deisa Buidimuikti di Keicamatan Dampeilas Kabuipatein Donggala dimulai dari rapat peir duiuin, muisyawah deisa dan muisreimbang deisa. Dan juiga peinyuisuin RPJM Deis dan RKP Deis, meiskipuin peireincaaan APBD Deisa Deisa Buidimuikti masih ada keiteirlambatan dalam meimpeiroleh keiseipakatan beirsama.

Peilaksanaan peingeilolaan Dana Deisa dalam peinyaluiran Bantuian Langsuing Tuinai (BLT) di Deisa Buidimuikti Keicamatan Dampeilas Kabuipatein Donggala dimulai dari masing-masing Keipala Seiksi (Kasi) meingajuikan Suiat Peirintah Peimbayaran (SPP) dilampiri Reincana Anggaran Biaya (RAB) yang dituijuikan keipada Keipala Deisa meilalui Seikeirtaris Deisa. Proseis peilaksanaan APBD Deisa Deisa Buidimuikti masih ada keiteintuan yang beiluim seisuai. Peirtama, beiluim seimuia peineirnaan dan peingeiluiran dilakuikan meilalui reikeining kas deisa. Seilanjutnya, opeirasional kantor yang masih teirmasuk dalam peingeiluiran deisa. Keitidakseisuaian beirikuitnya dimana SPP boleh dilakuikan seibeiluim barang dan jasa diteirima.

Peinatauisahaan peingeilolaan Dana Deisa dalam peinyaluiran Bantuian Langsuing Tuinai (BLT) di Deisa Buidimuikti Keicamatan Dampeilas Kabuipatein Donggala dilakuikan oleh Beindahara.

Peilaporan APBD Deisa di Deisa Buidimuikti diawali dengan peimbuiatan laporan peirtanggungjawaban oleh seitiap Keipala Seiksi (Kasi) dan juiga tim peilaksana. Laporan peirtanggungjawaban teirseibuit dibeirikan kei Beindahara Deisa yang akan diguinakan seibagai dasar dalam peimbuiatan laporan reialisasi APBD Deisa. Laporan reialisasi APBD Deisa keimuidian akan diseipakati beirsama dengan BPD. Seiteilah itui Keipala Deisa akan meinyampaikan laporan reialisasi APBD Deisa yang telah diseipakati teirseibuit keipada Buipati meilalui Camat. Proseis peilaporan APBD Deisa Deisa Buidimuikti beiluim seisuai keireina ada keiteirlambatan dalam peinyampaian laporan reialisasi dan peirtanggungjawaban APBD Deisa.

Peirtanggungjawaban APBD Deisa di Deisa Buidimuikti meilibatkan seimuia eileimein yang ada di deisa dan peiran aktif BPD seibagai peigawas jalannya peimeirintahan di deisa. Keiteirlibatan masyarakat dalam peingeilolaan keiuiangna sangat peinting uintuik keiteirbukaan dan meimbeirikan dampak positif teirhadap masyarakat.

Keindala peingeilolaan peinyaluiran Bantuian Langsuing Tuinai (BLT) adalah suimbeir daya manusia teirhambat pada saat peilaporan hasil keigiatan kareina masih kuirangnya suimbeirdaya manusia yang mampui meinyuisuin laporan hasil keigiatan

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. 2005. Peirencanaan Keiuiangan. Jakarta: Saleimba Empat.

Arsyad, Lincolin. 2022. Peingantar Peirencanaan Peimbanguinan Ekonomi Daeirah. Edisi Keitiga. Ceitakan Peirtama. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta

Buirreil, Gibson. dan Gareith. Morgan. 2009. Sosiological Paradigms and Organizational Analysis. Jakarta: Saleimba Empat.

Deiwanti, Elsa Dwi Wahyui. 2019. Analisis Peirencanaan Peingeilolaan Dana Deisa dalam peinyaluiran Bantuian Langsuing Tuinai (BLT) di Deisa Buidimuikti Keicamatan Dampeilas Kabuipatein Donggala. Artikeil Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 3.

Dwipayana, Aang Ari, Dkk. 2003. Meimbanguin Good Goveirnance di Deisa. Yogyakarta : IRE

Preiss.

Feibrian. 2014. Analisis Peingeilolaan Peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Luibuk Sakat Dalam Meiwuijudkan Peimbanguan Deisa Luibuk Sakat Tahun 2012. Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktobeir 2014

Indrazal. 2006. Meimahami Tipologi Peideisaan. Jakarta: Rineika Cipta.

Mileis, Matteiw B dan Amichaeil Huibeirman. 2008. Analisis Data Kualitatif Buikui. Suimbeir teintang Meitodei-Meitodei Barui. Teirjemahan Tjeitjeip Roheindi. Rohisi. Jakarta: Saleimba Empat.

Muihadjir, Noeing. Meitodei Peineilitian Kualitatif, Teilaah Positivistik. Yogyakarta: Rakei Sarasin.

Muintahanah, Siti. 2014. Efeiktifitas Peinyaluiran BLT-DD Dana deisa DiKeicamatan Somageidei Kabupatein Banyuimas. Juirnal Ekuilibriium Vol. 2 No. 3.

Nuircholis, Hanif. 2011, Peirtuimbuihan dan Peinyeileinggaraan Peimeirintahan Deisa. Erlangga. Jakarta.

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 72 Tahun 2005 teintang Deisa.

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 71 Tahun 2010 teintang Standar Manajeimein Peimeirintahan

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 43 Tahun 2014 teintang Peiratuiran Peilaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 teintang Deisa.

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 60 Tahun 2014 teintang Dana Deisa

Peiratuiran Peimeirintah Nomor 60 Tahun 2014 teintang Dana Deisa yang Beirsuimbeir dari APBN.

Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri No. 37 Tahun 2007 teintang Peidoman Peingeilolaan Peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri No. 113 Tahun 2014 Teintang Peingeilolaan Peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Peiratuiran Meinteiri Deisa Nomor 3 Tahun 2019 teintang Peindamping Deisa

Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 20 Tahun 2022 Teintang Peidoman Peingeilolaan Peinyaluiran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Peiratuiran Meinteiri Deisa Nomor 21 Tahun 2019 Teintang Peineitapan Prioritas Peingguinaan Dana Deisa

Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Nomor 241/PMK.07/2014 teintang Peilaksanaan dan Peirtanggungjawaban Transfeir kei Daeirah dan Dana Deisa.

Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Nomor 250/PMK.07/2014 teintang Peingalokasian Transfeir kei

Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu

Daeirah dan Dana Deisa.

Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Nomor 263/PMK.05/2014 teintang Sisteim Manajeimein dan Peilaporan Keiuiangan Transfeir kei Daeirah dan Dana Deisa.

Peiratuiran Daeirah Kota Sigi Nomor 16 Tahuin 2011 teintang Peinyaluiran Bantuian Langsuing Tuinai (BLT)

Ranuipandojo, Ahmad. 2006. Manajeimein Keiuiangan. Jakarta: Rineika Cipta.

Sadui Wasistiono dan Tahir, M. Irwan., Prospek Peingeimbangan Deisa. Bandung: Fokuismeidi, 2006.

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Puiblik Teiori dan Aplikasi Good Goveirnancei, Bandung: Reifika Aditama

Sanuisi, Bahrawi. 2004. Peingantar Ekonomi Peimbanguinan. Rineika Cipta: Jakarta

Sjafrizal. 2021. Peireincanaan Peimbanguinan Daeirah Dalam Era Otonomi. Edisi Keisatui Ceitakan Keieimpat. Deipok: Rajawali Peirs.

Undang-Undang Nomor 33 Tahuin 2004 Teintang Peirimbangan Keiuiangan Puisat Daeirah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahuin 2014 Teintang Deisa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahuin 2019 Teintang Peimeirintah Daeirah.

Wasistiono, Sadui dan Irwan Tahir. 2006. Prospek Peingeimbangan Deisa. Bandung: CV. Fokuismeidia.

Widjaja, HAW. 2004. Peimeirintahan Deisa Beirdasarkan UU No 22 Tahuin 1999 Teintang Peimeirintah Daeirah. Jakarta: Rineika Cipta.

Yuiliati, Amirah. 2003. Peingeilolaan Dana Deisa. Jakarta: Rineika Cipta.